

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pemilihan umum menjadi sarana konversi suara rakyat untuk diamanahkan kepada orang tertentu yang dianggap mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup hak disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum serta mengetahui regulasi dan bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif serta menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Terdapat hak memilih bagi penyandang disabilitas yang harus dilindungi. Hal ini kurang diperhatikan dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga menyebabkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Tidak terpenuhinya fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilihnya dianggap mengurangi hak pilih penyandang disabilitas. Selanjutnya, peraturan yang multitafsir hingga penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan untuk memilih dalam pemilihan umum serta diperbolehkannya pendamping bagi penyandang disabilitas menjadi hambatan utama pemenuhan hak mereka. Permasalahan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, diperlukan peninjauan ulang terhadap undang-undang yang bertentangan dengan asas dan perundang-undangan di atasnya, serta sosialisasi kepada penyandang disabilitas harus optimal dan seluruh fasilitas harus terpenuhi agar asas langsung dan rahasia tidak lagi disimpangi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

**Kata Kunci:** Pemilihan umum, penyandang disabilitas, hak memilih, perlindungan hukum.

**ABSTRACT**

*The general election is means of popular sovereignty. The general election into a means of conversion for the voice of the people entrusted to certain people who are considered capable of. The purpose of this study was to determine the scope of disability rights in the implementation of general elections and to know the regulations and forms of fulfillment of the rights of persons with disabilities in the conduct of general elections. The writing process uses normative method by doing conceptual approach, statute approach and historical approach. In the implementation of the general election, there is choosing the right for persons with disabilities that must be protected. This is not considered in the conduct of general elections which cause discrimination for person with disabilities. The facilities not satisfied for person with disability to give their right to vote considered reducing the voting rights of person with disability. Furthermore, multi-interpretative regulations so that persons with disabilities do not have the opportunity to vote in general elections and the permissibility of facilitators for persons with disabilities is the main obstacle to fulfilling their rights.. That problems are contradictory to Law No. 7 year 2017 on general elections. Furthermore, it is necessary to review the laws that are contrary to the principles above. Then, socialization of persons with disabilities must be optimal and all facilities must be fulfilled so that the direct and confidential principles are no longer deviated from the conduct of general elections.*

**Keywords:** *General elections, person with disability, right to vote, legal protection.*